

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

- Anton Tabah, 2003, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-macan Asia)*. Cetakan Ketiga, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- E.Utrecht, 1953, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, PT. Balai Buku, Jakarta.
- Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thala Media
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo.
- Ifdhal Kasim, 2005, *Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik, Sebuah Pengantar*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2013, *Buku Ajar Hak Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab*, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, judul asli: *Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, 2011, *Community Policing : Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, Jakarta, PT. Sofmedia,
- Mahmud. Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, edisi ketiga, PTIK, Jakarta.
- Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, 2003, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Stout HD, 2004, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **Jurnal/Makalah :**

Andrizal, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016

Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Bambang Sutiyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Unisia No. 44/XXV/I/2002

Jonny Sinaga, 2007, *Kewajiban Negara Dalam ICCPR*, artikel pada majalah: *Jurnal HAM*, Vol. 4 No. 4 Th. 2007, ISSN 1693-6027, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta

Mulyadi. M, 2012, “*Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*,” Jurnal Studi Komunikasi dan Media, vol. 16, No. 1.

Nanan Sukarna, 2008 “*Reformasi Kepolisian Negara RI: Taking The Heart and Mind*”. Makalah. Disampaikan pada Diskusi Publik ProPatria, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Rusadi Kantaprawira, 1998, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

Sarah Safira Aulianisa, Athira Hana Aprilia, *Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat*, *Padjajaran Law Review* Vol. 7 No. 2, 2019

Simamora, Janpatar. 2009. “Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”. *Jurnal Visi*.

STR John May Lam, “*The Police Of Briatai*”, *Majalah Bhayangkara*, Terjemahan, Jakarta: Bhayangkara.

The International Center for Not-for-Profit Law, “*The Right to Freedom of Expression: Restriction and Fundamental Right*”, *Global Trends in NGO Law*, Volume 6, Issue 1

### **Internet :**

Ahmad Ali. *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*, <http://www.hamline.edu>. diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

Ari Welianto, *Cara dan Bentuk Mengemukakan Pendapat*",  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/08/170000169/cara-dan-bentuk-mengemukakan-pendapat?page=all>

Hamdan Firdaus, *Hukum Demostrasi dan Unjuk Rasa Dalam Islam*,  
<https://hamdanifirdaus.wordpress.com/2013/04/14/hukum-demostrasi-dan-unjuk-rasa-dalam-islam/>

ICJR, “Mengetahui Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik”,  
<https://icjr.or.id/mengetahui-konvensi-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

Krisnaptik. “*Diskresi Kepolisian*”. <http://krisnaptik.wordpress.com>. diakses pada tanggal 26 Agustus 2013.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*  
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-sebagai-upaya-mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>

Muchlisin Riadi, *Unjuk Rasa atau Demokrasi*,  
<https://www.kajianpustaka.com/2016/11/unjuk-rasa-atau-demonstrasi.html>

M. Prawiro, *Pengertian Demonstrasi: Arti, Sejarah, Penyebab dan Akibatnya*,  
<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-demonstrasi.html>

[Pengertian HAM : Sejarah, Ciri-ciri dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia - Buku Deepublish \(penerbitbukudeepublish.com\),  
https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-ham/](https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-ham/)

Sovia Hasanah, Demo-demo yang Dilarang,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837954be4c7a/ini-demo-demo-yang-dilarang/>

United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, Universal Declaration Of Human Rights,  
<https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan

Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.